



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**

Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770 Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205  
PO BOX 4451 JKTS. Website : www.bnptki.go.id

Jakarta, 21 Januari 2019

Nomor : B.25/PEN/II/2019  
Lampiran : 1 set  
Perihal : Panduan SOP Pelayanan Penempatan PMI

**Kepada Yth.**

- 1. Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Ketenagakerjaan**
  - 2. Direktur Utama P3MI**
- di

**Seluruh Indonesia**

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan panduan bagi petugas pelayanan terkait dengan proses penempatan CPMI yang dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** dapat diimplementasikan penggunaan SOP Pelayanan Penempatan melalui SISKOTKLN sebagai berikut :
  - a. SOP Perubahan Data Diri CPMI
  - b. SOP Penghapusan ID CPMI
  - c. SOP Pengaktifan ID CPMI untuk ID CPMI setelah 6 bulan (*expired*)
  - d. SOP Pelimpahan PMI untuk P3MI yang dikenai tundalayan/skorsing/cabut SIPPTKI
  - e. SOP Penghapusan Petugas P3MI
2. Pelaksanaan SOP pada poin a sd. d tersebut mengacu pada tempat registrasi CPMI, untuk itu petugas pelayanan penempatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota diharapkan dapat melakukan pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis (*terlampir*).
3. Dalam mekanisme perubahan data di SISKOTKLN yang saat ini berjalan akan diperbarui mengikuti prosedur yang berlaku setelah adanya pemberlakuan SOP tersebut di atas. Untuk SOP Perubahan Data Ketenagakerjaan PMI (Perubahan Data Negara, Agensi, Sektor dan Jabatan) tetap mengikuti prosedur pada Surat Deputi Penempatan nomor B.03/PEN/II/2016, untuk pelimpahan PMI hanya diperkenankan bagi P3MI yang dikenai tunda layan/skorsing/cabut SIPPTKI.
4. Apabila terdapat kendala teknis dan memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sunardi dengan nomor HP. 087889364135 atau dapat melalui email [sipjoditppbnptki@gmail.com](mailto:sipjoditppbnptki@gmail.com).

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Penempatan, BNP2TKI;
3. Kepala Puslitfo, BNP2TKI;
4. Ketua Asosiasi P3MI.

Lampiran Surat

Nomor : B.25/PEN-P2P/II/2019

Tanggal : 21 Januari 2019

**IDENTIFIKASI KEGIATAN**

No	Jenis SOP	Persyaratan Dokumen	Keterangan Kegiatan
a.	Perubahan data diri PMI meliputi perubahan nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nama orang tua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari Direktur Utama P3MI kepada Disnaker Kab./Kota yang akan diajukan perubahan data;</li> <li>2. Surat Pernyataan PMI;</li> <li>3. Dokumen pendukung perubahan data (paspor, KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga atau dokumen lainnya).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan sebelum PAP.</li> <li>2. Persetujuan dilakukan oleh Petugas di unit teknis yang meregistrasi PMI.</li> <li>3. Pengajuan melalui SISKOTKLN.</li> </ol>
b.	Penghapusan ID PMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari Direktur Utama P3MI kepada Disnaker Kab./Kota PMI yang akan diajukan penghapusan;</li> <li>2. Surat Pernyataan PMI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan sebelum PAP;</li> <li>2. Persetujuan dilakukan oleh Petugas di unit teknis yang meregistrasi PMI.</li> </ol>
c.	Pengajuan Pengaktifan ID PMI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari Direktur Utama P3MI kepada Disnaker Kab./Kota yang melakukan registrasi;</li> <li>2. Daftar nominatif PMI yang berisi Nama PMI, nomor paspor, ID PMI, Negara dan Alasan pengajuan kembali;</li> <li>3. Surat Keterangan Alasan pengajuan kembali oleh Direktur P3MI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penonaktifan ID PMI diberlakukan bagi PMI yang tidak dapat menyelesaikan proses penempatan dari registrasi sampai dengan PAP selama 6 (enam) bulan secara otomatis akan dilakukan nonaktif oleh sistem;</li> <li>2. Bagi PMI nonaktif yang akan melanjutkan proses dapat diajukan pengaktifan kembali melalui SISKOTKLN ditujukan ke tempat registrasi CPMI;</li> <li>3. Pengajuan pengaktifan ID hanya satu kali.</li> </ol>
d.	Pelimpahan PMI untuk P3MI yang dikenai tundalayan/skorsing/cabut SIPPTKI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dari Direktur Utama P3MI kepada Disnaker Kab./Kota yang melakukan registrasi PMI;</li> <li>2. Berita acara serah terima dari kedua belah pihak Direktur Utama P3MI;</li> <li>3. Perjanjian penempatan yang sudah disesuaikan;</li> <li>4. Surat Izin Pengerahan dan Surat Pengantar Rekrut;</li> <li>5. Surat Pernyataan PMI;</li> <li>6. Surat Ijin Orang tua/suami/istri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Permohonan sebelum PAP;</li> <li>2. Persetujuan dilakukan oleh Petugas di unit teknis yang meregistrasi PMI;</li> </ol>
e.	Penghapusan Petugas PMI	Pengajuan dilakukan secara langsung melalui User ID SISKOTKLN Direktur Utama tanpa mengunggah dokumen.	Direktur Utama P3MI dapat mengajukan penghapusan Petugas PMI melalui SISKOTKLN.